

Pengaruh Kepemimpinan Kelurahan Terhadap Kinerja Kolektor Dalam Efektivitas Pencapaian Target PBB

Cecep Nurdiansah¹, Ieke Sartika Iriany², Dody Hermana³

^{1,2,3}Program Studi Magister Ilmu Administrasi Negara, Universitas Garut

¹24091121007@pasca.uniga.ac.id

²iekesartika@uniga.ac.id

³doddyhermana@uniga.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bermaksud untuk memeriksa keterkaitan antara kepemimpinan, kinerja kolektor, dan pencapaian target pajak properti yang efektif. Metode kuantitatif inferensial digunakan sebagai metode pada penelitian ini yaitu penggunaan teknik survei di Kelurahan Ciwalen, Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut. Sejumlah 39 responden turut serta dalam penelitian ini. Dari apa yang didapat dari hasil analisa, menyimpulkan kepemimpinan kelurahan, pengaruh yang signifikan tidak dimiliki pada lingkup kolektor dalam efektivitas pencapaian target pajak properti di Kelurahan Ciwalen Kecamatan Garut Kota. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel kepemimpinan kelurahan kurang berpengaruh signifikan terhadap kinerja kolektor, yaitu sebesar 5,3%, dan variabel lainnya yang tidak menjadi fokus utama penelitian. Nilai sign dari variabel kepemimpinan kelurahan juga memaparkan variabel yang tidak mempengaruhi signifikan di kinerja kolektor. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa kinerja kolektor tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada efektivitas pencapaian target pajak properti, hanya sebesar 8,7%. Sebagian besar merupakan faktor yang tidak menjadi fokus utama penelitian, berkontribusi pada pencapaian target pajak properti. Maka, kesimpulannya adalah kinerja kolektor tidak menjadi faktor penentu dalam pencapaian target pajak properti. Data terbaru menunjukkan bahwa kinerja kolektor tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas pencapaian target pajak properti, hanya sebesar 8,7%, sementara faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian memiliki pengaruh tinggi.

Kata Kunci: Efektivitas Pencapaian Target, Kepemimpinan Kelurahan, Kinerja Kolektor.

1. Pendahuluan

Pembangunan nasional adalah usaha yang berkelanjutan untuk melibatkan semua aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Pelaksanaannya melibatkan berbagai aspek kehidupan bangsa, seperti politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Tujuan pelaksanaan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan cita-cita nasional yang terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, seperti perlindungan terhadap seluruh bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, peningkatan kesejahteraan umum, pembangunan kecerdasan bangsa, dan mencapai tujuan bangsa.

Dalam konteks penelitian ini, kepemimpinan kelurahan memiliki peran penting dalam mendorong kinerja kolektor dalam mencapai target PBB yang efektif. Kepemimpinan kelurahan harus direncanakan secara terarah, menyeluruh, terpadu, bertahap, dan berkelanjutan agar dapat memberikan pengaruh yang signifikan pada kinerja kolektor dan efektivitas pencapaian target PBB. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh kepemimpinan di level kelurahan terhadap kinerja kolektor dalam mencapai target PBB yang lebih efisien. Diharapkan data dari hasil penelitian akan memberikan saran berharga dalam meningkatkan efektivitas para pegawai pemerintahan demi mencapai tujuan pembangunan nasional yang lebih baik.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional pada dasarnya adalah wujud keberhasilan pembangunan di setiap tingkat daerah yang sedikit banyak tergantung pada keberhasilan kepemimpinan pemimpin wilayah dalam memimpin pelaksanaan pembangunan di daerahnya atau di wilayah masing-masing pimpinan yang dimaksud, termasuk “kepemimpinan di tingkat kelurahan”.

Kepala Kelurahan (Lurah) bertanggung jawab untuk membantu dalam berbagai tugas pemerintahan, seperti pemberdayaan masyarakat, pelayanan publik, pemeliharaan ketertiban umum, sarana dan prasarana, serta tugas tambahan yang diberikan oleh Camat. Dalam hal ini, Lurah memiliki kewenangan untuk melakukan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, sepanjang hal itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak yang dikenakan pada kepemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan tanah dan bangunan oleh individu atau badan. Namun, beberapa bidang industri, seperti perkebunan, perhutanan, dan pertambangan, tidak termasuk pada pajak ini. Pajak ini memiliki peran penting dalam menghasilkan pendapatan bagi pemerintah untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Tarif PBB ditentukan berdasarkan kondisi fisik dari objek tanah atau bangunan yang bersangkutan, karena pajak ini memiliki sifat yang berkaitan dengan benda.

Keberhasilan kepemimpinan Lurah di suatu kelurahan bisa dilihat dari sejauhmana kinerja pegawai / aparatur kelurahan yang berada di bawahnya / kinerja para bawahannya. Kinerja pegawai merujuk pada hasil kerja yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai dengan tanggung jawabnya (Mangkunegara, 2005). Bila kepala kelurahan berhasil mengitari program pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di wilayahnya, hal itu akan memberikan pengaruh positif pada kinerja para kolektor yang bertugas menjalankannya agar mencapai target yang disepakati. Tak hanya itu, keberhasilan ini juga akan berdampak pada efektivitas dan kesuksesan dalam mencapai target Pajak Bumi dan Bangunan yang sebelumnya telah ditentukan. Sebagai asisten yang membantu, saya berharap tindakan kepala kelurahan yang kreatif dapat mendorong para wajib pajak untuk memenuhi kewajiban mereka dalam membayar pajak.

Dulu, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dianggap sebagai pajak pusat, namun kini telah dialihkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang saat ini dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Garut. Pengalihan ini dilaksanakan sejak 1 Januari 2014 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Pemerintah Kabupaten Garut kemudian mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang telah mengalami beberapa kali perubahan, hingga terakhir diubah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah.

Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2022 telah dikeluarkan sebagai pedoman operasional dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Garut. Hasil pemungutan pajak tersebut akan menjadi bagian dari pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Karena APBD dibuat terlebih dahulu, maka target pendapatan pajak bumi dan bangunan pada tahun yang bersangkutan telah direncanakan sebelumnya. Target pendapatan ini akan diberikan kepada Pemerintahan Desa atau Kelurahan oleh Pemerintah Kabupaten Garut untuk direalisasikan.

Pemungutan pajak bumi dan bangunan kemudian dilakukan oleh pihak Kelurahan atau Pemerintahan Desa. Pihak Kelurahan atau Pemerintahan Desa, termasuk Kelurahan Ciwalen Kecamatan Garut Kota pada setiap tahunnya diberikan target pendapatan dari Pajak Bumi dan Bangunan, yang telah ditentukan jumlahnya.

Pada kenyataannya target tersebut seringkali berada di luar jangkauan kemampuan pihak Kelurahan, karena di lapangan banyak ditemukan hal-hal yang pada akhirnya menyebabkan target yang ditentukan menjadi tidak tercapai.

Berdasarkan hasil observasi awal di lapangan, ditemukan beberapa data/informasi seputar Pajak Bumi dan Bangunan di Wilayah Kelurahan Ciwalen, yang dapat peneliti sajikan sebagai berikut:

- a. Pada tahun 2019, Jumlah WP (wajib pajak) yang melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Wilayah Kelurahan Ciwalen Kecamatan Garut Kota, dari keseluruhan Wajib Pajak, hanya berjumlah sebagian besar saja, dengan perolehan hanya 65,6 persen dari target 100 persen. Berarti terdapat sekitar 34,4 persen dana yang masih berada di wajib pajak yang tidak melakukan kewajibannya.

Pada tahun 2020, perolehan dari pembayar Jumlah WP (wajib pajak) yang melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan hanya 66 % dari target 100 %. Berarti terdapat sekitar 34 persen dana yang masih berada di wajib pajak yang tidak melakukan kewajibannya.

Pada tahun 2021, perolehan dari pembayar Jumlah WP (wajib pajak) yang melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan hanya 67 % dari target 100 %. Berarti terdapat sekitar 33 % dana yang masih berada di wajib pajak yang tidak melakukan kewajibannya.

Berdasarkan hasil wawancara awal kepada Pimpinan Kelurahan Ciwalen dan Koordinator PBB Kelurahan Ciwalen, diperoleh informasi bahwa kepada warga Ciwalen yang berstatus Wajib Pajak telah dilakukan pemberitahuan sewajarnya sesuai dengan prosedur yang ada dan biasanya, tetapi sampai akhir tanggal jatuh tempo pembayaran PBB, tidak melakukan kewajibannya. Hal ini peneliti asumsikan bahwa warga Kelurahan Ciwalen yang berstatus wajib PBB dan tidak melakukan kewajibannya, sebagai warga yang kurang memiliki kesadaran hukum.

Mengenai jumlah nominal perolehan dalam tiga tahun berturut-turut (tahun 2019, 2020 dan tahun 2021) terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara jumlah perolehan PBB yang menjadi target dengan jumlah perolehan dalam realisasinya. Pada tahun 2019, target perolehan PBB berjumlah Rp. 158.897.735,- namun realisasinya hanya berjumlah 104.234.424,-. Pada tahun 2020, target perolehan PBB berjumlah Rp. 158.998.943 namun

relisasinya hanya berjumlah 105.137.215,- dan terakhir pada tahun 2021, target perolehan PBB berjumlah Rp. 158.787.811,- sedangkan relisasinya hanya berjumlah 106,934,577,-

Adanya selisih antara jumlah target yang telah ditetapkan dengan jumlah realisasi, dalam tiga (3) tahun berturut-turut, peneliti asumsikan sebagai akibat kurang optimalnya kinerja dari kolektor yang bersangkutan, hal ini diketahui bahwa seringkali SPPT wajib pajak sudah sampai ke wajib pajak yang bersangkutan, namun petugas kolektor hanya menunggu sampai akhir jatuh tempo dan berharap WP segera melakukan kewajibannya. Waktu antara setelah WP menerima SPPT sampai akhir tanggal jatuh tempo berlalu tanpa upaya penagihan.

- b. Tidak tercapainya realisasi perolehan PBB karena adanya selisih antara jumlah PBB yang ditargetkan dengan jumlah realisasi PBB, sehingga muncul status tidak tercapai target, maka peneliti berpendirian bahwa belum tercapai efektivitas dalam penagihan PBB tersebut. Berdasarkan data di atas serta hasil wawancara awal kepada pimpinan Kelurahan diperoleh data dan informasi bahwa cara melakukan penagihan kepada warga yang berkewajiban membayar PBB adalah dengan mengandalkan tenaga kolektor PBB khusus dan dilakukan pada hari-hari tertentu pada saat pagi hari atau siang hari sesuai dengan jam kerja.

Berdasarkan fenomena masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, peneliti berpendirian bahwa salah satu faktor yang bisa berpengaruh terhadap kinerja kolektor dalam mencapai efektivitas pencapaian perolehan Pajak Bumi dan Bangunan adalah faktor Kepemimpinan Kelurahan, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kepemimpinan Kelurahan Terhadap Kinerja Kolektor Dalam Efektivitas Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan”.

Dalam penelitian ini, terdapat sebuah pertanyaan utama (problem question) yang perlu dijawab, yaitu apakah terdapat hubungan antara kepemimpinan dan kinerja kolektor terhadap efektivitas pencapaian target pajak bumi dan bangunan.

Selanjutnya pertanyaan masalah utama di atas dirumuskan dan dirinci lebih lanjut dalam bentuk sub-sub pertanyaan masalah sebagai berikut:

- a. Adakah pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja Kolektor?
- b. Adakah pengaruh kinerja kolektor terhadap efektivitas pencapaian target Pajak Bumi dan Bangunan?
- c. Adakah pengaruh kepemimpinan terhadap efektivitas pencapaian target Pajak Bumi dan Bangunan?

2. Tinjauan Kepustakaan

Menurut Dimock and Dimock seperti yang dikutip dalam Iskandar pada tahun 2017, administrasi negara adalah sebuah disiplin ilmu yang berkaitan dengan pemahaman atas apa yang diinginkan oleh masyarakat dari pemerintah, dan bagaimana cara mereka dapat mencapainya. Oleh karena itu, studi mengenai administrasi negara tidak hanya membahas tentang tujuan-tujuan pemerintah yang akan dicapai, namun juga mencakup bagaimana pemerintah melakukan tindakan dan kebijakan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

a. Kepemimpinan

Veithzal (2012) menyatakan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan seseorang dalam membina kerjasama dan hubungan baik, serta kemampuan yang efektif dan partisipatif, juga mempunyai kemampuan dalam mendelegasikan tugas dan wewenangnya.

b. Kinerja Pegawai

Sukses dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan yang diberikan oleh organisasi adalah salah satu contoh dari kinerja pegawai. Untuk mengukur kinerja pegawai, terdapat beberapa dimensi yang bisa digunakan sebagai alat ukur, seperti kuantitas dan kualitas pekerjaan, kemandirian, inisiatif, adaptabilitas, dan kerjasama. Hal ini sejalan dengan pendapat Mondy, R.W. dan rekan-rekannya dalam Suwatno (2019: 161).

c. Efektivitas

Efektivitas dapat diukur dengan melihat sejauh mana organisasi berhasil mencapai tujuannya. Konsep efektivitas juga bisa diartikan sebagai tingkat kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan tujuan yang ingin dicapai. Untuk menentukan efektivitas suatu organisasi, diperlukan pengukuran terhadap hasil kinerja organisasi tersebut terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Richard dan M. Steers (2005: 46), terdapat beberapa alat ukur efektivitas, antara lain: Kemampuan Menyesuaikan Diri, Prestasi Kerja, Kepuasan Kerja, Kualitas, dan Penilaian Oleh Pihak Luar.

3. Metode

Penelitian dilakukan dengan metode Kuantitatif Inferensial dan menggunakan teknik survey. Peneliti mengambil sampel dari Kantor Kelurahan Ciwalen di Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut. Jumlah responden yang diambil sebanyak 39 orang.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Hasil

Penelitian ini mengkaji tiga variabel, yaitu satu variabel bebas atau independen Kepemimpinan Kelurahan sebagai variabel X, satu variabel antara atau intervening Kinerja Kolektor (Y), dan satu variabel terikat atau dependen Efektivitas Pencapaian Target PBB (Z). Masing-masing variabel terdiri atas beberapa dimensi yang dikembangkan menjadi beberapa indikator.

a. Kepemimpinan Kelurahan

Dalam penelitian ini, terdapat lima dimensi kepemimpinan kelurahan yang terdiri dari 10 indikator yang diukur melalui kuesioner yang diisi oleh responden. Berdasarkan hasil penilaian, kepemimpinan yang ditunjukkan oleh Kepala Kelurahan dinilai "baik" dengan skor rata-rata mencapai 161,2 atau setara dengan persentase rata-rata 82,67. Indikator nomor 1, 3, dan 8 mencapai skor tertinggi dengan persentase mencapai 163,1%, sedangkan indikator nomor 7 memiliki persentase skor terendah yakni 81,5%. Indikator ini termasuk dalam dimensi "Kemampuan dalam mendelegasikan tugas".

b. Kinerja Kolektor

Responden diminta untuk menjawab pertanyaan kuisioner terkait enam dimensi variabel Kinerja Kolektor, yang terdiri dari 12 indikator (item). Berdasarkan hasil penilaian, para kolektor PBB di Kelurahan Ciwalen menunjukkan kinerja yang "baik" dengan mencapai skor rata-rata 147,08 dari total skor ideal 160, atau mencapai persentase rata-rata 75,43%. Indikator dengan persentase skor tertinggi 80,5% adalah nomor 6, yaitu "Kualitas pekerjaan selalu dikerjakan kolektor dengan lengkap", yang terdapat dalam dimensi "Kualitas". Sedangkan indikator dengan persentase skor terendah 73,8% adalah nomor 9, yaitu "Pegawai/kolektor mempunyai kemampuan untuk beradaptasi", yang terdapat dalam dimensi "Adaptabilitas".

c. Efektivitas Pencapaian Target PBB

Dalam kuisioner yang ditujukan kepada responden, variabel Efektivitas Pencapaian Target PBB terdiri dari 10 indikator yang dikembangkan dari lima dimensi. Secara keseluruhan, aspek-aspek Efektivitas pencapaian target PBB telah menunjukkan kondisi yang baik dengan mencapai skor rata-rata sebesar 148,9 dari total skor ideal 195 atau mencapai persentase rata-rata 76,36%. Indikator nomor 3,4, dan 6 menunjukkan persentase skor tertinggi sebesar 77,4% dan terdapat pada dimensi "Prestasi Kerja" dan "Kepuasan Kerja". Namun, indikator nomor 5 menunjukkan persentase skor terendah sebesar 74,9% dan terdapat pada dimensi "Kemampuan Menyesuaikan Diri".

4.2 Pembahasan

a. Pengaruh Kepemimpinan Kelurahan (X) Terhadap Kinerja Kolektor (Y)

Berdasarkan hasil pengujian Uji t sesuai dengan persamaan Struktural 1 Model Analisis Jalur, pada "Model Summary" pada *R Square* nya menunjukkan bahwa Kepemimpinan Kelurahan kurang berpengaruh signifikan terhadap kinerja kolektor yaitu sebesar (0,053x100%) 5,3% sedangkan sisanya sebesar 94,7% dipengaruhi oleh variabel lain (*epsilon*) yang tidak diamati dalam penelitian ini.

Pada tabel "coeficients", menunjukkan nilai *sign* yaitu 0,160 > dari 0,05, ini berarti Kepemimpinan Kelurahan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja kolektor.

b. Pengaruh Kinerja Kolektor (Y) Terhadap Efektivitas Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan (Z)

Berdasarkan hasil pengujian yang diperoleh dari "Model Summary", terlihat bahwa tidak ada pengaruh signifikan antara Kinerja Kolektor (Y) dan Efektivitas Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan (Z), hanya sebesar 8,7% (0,089x100%), sementara 91,1% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain (*epsilon*) yang tidak diamati dalam penelitian ini. Dalam tabel "Coeficients", nilai sig dari variabel Y = 0,124, yang lebih besar dari 0,05, menunjukkan bahwa variabel Y tidak berpengaruh signifikan terhadap Z.

c. Pengaruh Kepemimpinan Kelurahan (X) Terhadap Kinerja Kolektor (Y) dalam Efektivitas Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan (Z)

Berdasarkan hasil analisis (pada "Model Summary"), dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara Kepemimpinan Kelurahan (X) melalui Kinerja Kolektor (Y) terhadap

Efektivitas Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan (Z), yang ditunjukkan oleh persentase pengaruh sebesar 8,7% dan sisanya sebesar 91,1% dipengaruhi oleh faktor lain (epsilon) yang tidak diobservasi dalam penelitian ini.

Pada tabel “*Coefiseints*”, nilai *sig* dari variabel X= 0,539 > dari 0,05 dan nilai *sig* dari variabel Y = 0,124 > dari 0,05 maka variabel X melalui Y tidak berpengaruh pada variabel Z.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pengolahan data dan pembahasan pada bab IV, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan hasil pengujian Uji t sesuai dengan persamaan Struktural 1 Model Analisis Jalur, pada “*Model Summery*” pada *R Square* nya menunjukkan bahwa Kepemimpinan Kelurahan kurang berpengaruh signifikan terhadap kinerja kolektor yaitu sebesar (0,053x100%) 5,3% sedangkan sisanya sebesar 94,7% dipengaruhi oleh variabel lain (*epsilon*) yang tidak diamati dalam penelitian ini. Nilai *sign* dari Variabel X yaitu 0,160 > dari 0,05, ini berarti Kepemimpinan Kelurahan (X) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Kolektor (Y).
- b. Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan (pada “*Model Summery*”) bahwa Kinerja Kolektor (Y) tidak berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Pencapaian Target PBB (Z), yaitu sebesar (0,089x100%) 8,7% sedangkan sisanya sebesar 91,1% dipengaruhi oleh variabel lain (*epsilon*) yang tidak diamati dalam penelitian ini. Nilai *sig* dari variabel Y = 0,124 > dari 0,05 maka variabel Kinerja Kolektor (Y) tidak berpengaruh signifikan pada variabel Efektivitas pencapaian target Pajak Bumi dan Bangunan Z.
- c. Berdasarkan hasil analisis pada "Model Summary", ditemukan bahwa pengaruh Kepemimpinan Kelurahan (X) melalui Kinerja Kolektor (Y) terhadap Efektivitas Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan (Z) tidak signifikan, yaitu hanya sebesar 8,7% dari total variansinya sedangkan sisanya sebesar 91,1% dipengaruhi oleh variabel lain (epsilon) yang tidak diamati dalam penelitian ini. Selanjutnya, hasil uji signifikansi pada tabel "Coeficients" menunjukkan bahwa nilai *sig* dari variabel X = 0,539 > dari 0,05 dan nilai *sig* dari variabel Y = 0,124 > dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa Kepemimpinan Kelurahan (X) melalui Kinerja Kolektor (Y) tidak berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan (Z).

Daftar Pustaka

- Cantika, B. Y. (2005). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Malang: UMM Press.
- Daft, R. L. (2010). *Era Baru Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hasibuan, Malayu Sp. (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Revisi, Cetakan Ke. Tigabelas. Jakarta : Bumi Aksara
- Indrawijaya, A. I. (2010). *Perilaku Organisasi* (Edisi 10). Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Iskandar, J. (2017). *Beberapa Indeks dan Skala Pengukuran Variabel-variabel Sosial dan Psikologi*. Bandung: Puspaga.
- (2017). *Manajemen Publik*. Bandung: Puspaga.
- (2017). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Puspaga.

- . (2020). *Modul Mata Kuliah Metode Penelitian*. Garut: Uniga.
- ., & Putradi, D. (2017). *Teori Administrasi*. Bandung: Puspaga.
- Kartono, K. (2008). *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mangkunegara, A. P. (2000). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- . (2014). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Prawirosentono, S. (2008). *Kebijakan Kinerja Karyawan* (edisi Revisi). Yogyakarta: BPFE.
- Riduan. (2005). *Skala Pengukuran Variabel Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Siegel, s. (1992). *Statistik Non Parametrik untuk Ilmu-ilmu Sosial* (Terjemahan ed.). Jakarta: Gramedia.
- Simamora, H. (1995). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Bagian Penerbitan YKPN.
- Soetari, Endang, Akbar, Gugun Geusan, Ulumudin, Aceng, Nabhani. Irfan. (2020). *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis Program Pascasarjana*, Garut: Pascasarjana Uniga.
- Steers. M. Richard. (1985). *Efektivitas Organisasi*, Jakarta: Erlangga.
- Subanegara, P. (2005). *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Yogyakarta: Perpustakaan Nasional.
- . (2019). *Statistik Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Suwatno. (2019). *Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Organisasi publik dan Bisnis* (1 ed.). Jakarta: Bumi Aksara.
- Syafei, I. K. (2003). *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Thoha, M. (2003). *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasi*. Jakarta: Rajawali.
- Ulum. Ihyaul MD. (2004). *Akuntansi Sektor Publik*, Malang: UMM Press.
- Uno, B. Hamzah. (2012). *Teori Kinerja dan Pengukurannya*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Veithzal, R. (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.